

SERI BUKU SAKU 2



kalyanamitra



OXFAM

BAGAIMANA PEREMPUAN KOMUNITAS MEMBANGUN KEKUATAN MENDORONG TRANSISI ENERGI BERKEADILAN





Buku Saku II:

**Bagaimana Perempuan Komunitas
Membangun Kekuatan Mendorong
Transisi Energi Berkeadilan**

©2025

Penulis:

Puspa Dewy

Tim Penyunting:

Febda Risha

Ilustrasi

Aiko Yoshina

Tata Letak

N. Roji Wahwan

Diterbitkan oleh:

**Asosiasi LBH APIK Indonesia
Kalyanamitra**

Didukung oleh:

Oxfam di Indonesia

PENGANTAR

Sebagian dari kita banyak yang berpandangan bahwa topik transisi energi jauh dari kehidupan kita. Kecenderungan cara pandang ini tidak lepas dari minimnya pembicaraan mengenai energi maupun transisi energi dengan bahasa yang membumi, namun lebih banyak disampaikan menggunakan istilah-istilah yang rumit dan teknis. Sedangkan 'energi' telah menjadi kebutuhan yang melekat kehidupan masyarakat sehari-hari untuk mendukung aktivitas domestik maupun publik.

Saat ini masyarakat dunia, termasuk Indonesia, masih bertumpu pada energi fosil yang dikategorikan sebagai 'energi kotor'. Energi 'kotor' telah menghasilkan emisi karbon tinggi melalui proses eksplorasi ekstraktif yang menghasilkan limbah serta alih fungsi lahan yang merusak hutan, yang telah berkontribusi besar pada terjadinya perubahan iklim serta ketidakadilan sosial-ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut itulah, suara untuk mendorong transisi energi menuju energi baru terbarukan dan bersih digencarkan secara global. Indonesia memiliki target untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia pun cukup bervariasi seperti energi surya, angin, hidro, panas bumi, bioenergi dan laut. Namun menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah proyek-proyek transisi energi telah tersebut benar-benar 'bersih' dan hijau? apakah konsep dan implementasinya telah adil? Apakah 'adil' yang dimaksud telah mengakui dan mengakomodasi perspektif, pengalaman, dan kebutuhan perempuan? Bagaimana dampak proyek-proyek transisi energi bagi perempuan? Siapa yang menikmati energi baru terbarukan? dan sejauh mana perempuan selama ini telah dilibatkan dan mendapatkan manfaat?

Beberapa pertanyaan tersebut penting diajukan agar kita semua, terutama organisasi perempuan, menggali dan menyuarakan keadilan dalam konteks transisi energi agar dalam konsep hingga implementasinya berperspektif gender dan inklusif. Perempuan, dengan berbagai ragam identitasnya, selama ini telah menghadapi layer-layer diskriminasi dan kekerasan karena norma sosial yang tidak adil gender masih membatasi bahkan membredel hak-hak perempuan, yang juga terjadi dalam konteks akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari transisi energi.

Buku saku ini disusun untuk mendukung kita lebih mendalami kepentingan kita sebagai kelompok perempuan untuk menyuarakan transisi energi yang adil dari perspektif perempuan.

Buku saku terbitan awal ini disusun dalam 2 (dua) seri yaitu (1) Perempuan Menyuarakan Transisi Energi Berkeadilan, (2) Bagaimana Perempuan Komunitas Membangun Kekuatan Mendorong Transisi Energi Berkeadilan.

Energi bersih merupakan hak kita semua sehingga perempuan perlu kritis dan menyuarakan kepentingannya. Mari kita rebut narasi 'adil' dalam transisi energi!.

'Energi Bersih, Adil, Inklusif'.

Jakarta, 20 Februari 2025

Khotimun Sutanti

Koordinator Pelaksana Harian
Asosiasi LBH APIK Indonesia

Ika Agustina

Direktur
Yayasan Kalyanamitra

PENDAHULUAN

Pada buku saku seri pertama telah diuraikan gambaran mengenai transisi energi berkeadilan serta keterhubungannya dengan kehidupan dan hak asasi perempuan, serta kelompok marginal lainnya. Buku seri pertama telah menguraikan berbagai isu yang masih menjadi persoalan dalam mendorong transisi energi berkeadilan, mulai dari kebijakannya maupun pada implementasinya.

Pada buku saku seri kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku saku seri pertama. Buku saku seri kedua ini banyak menguraikan mengenai kondisi-kondisi pemungkin dan upaya perempuan dalam mendorong transisi energi berkeadilan. Uraian yang disampaikan pada buku ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu; (a) tantangan dan peluang bagi perempuan komunitas dalam mendorong transisi energi berkeadilan, (b) Apa yang dapat dilakukan bagi perempuan komunitas dan masyarakat umum dalam mendorong transisi energi berkeadilan, dan (c) Bagaimana strategi dan upaya yang dapat dilakukan perempuan komunitas dan masyarakat umum dalam mendorong transisi energi berkeadilan.

DAFTAR ISI

Pengantar **i** Pendahuluan **iii** Daftar Isi **iv**

Bab I	
Mengenal Tantangan dan Peluang Perempuan Komunitas dalam Mendorong Transisi Energi Berkeadilan	1
A. Tantangan Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan	1
1. Tantangan pada Kebijakan di Indonesia	2
2. Tantangan juga masih dialami komunitas	6
B. Peluang Mewujudkan Transisi Berkeadilan	7
Bab II	
Apa yang Bisa Dilakukan Perempuan Komunitas dan Masyarakat Umum	9
A. Bagi Perempuan Komunitas	9
B. Bagi Masyarakat Umum	11
Bab III	
Bagaimana Cara Mendorong Transisi Energi Berkeadilan	13
A. Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah memastikan transisi energi berkeadilan	14
B. Bagaimana cara kita untuk mengupayakan terjadinya transisi energi berkeadilan?	15
1. Bagi Perempuan Komunitas	15
2. Bagi Masyarakat Umum	18

BAB I

MENGENALI TANTANGAN DAN PELUANG PEREMPUAN KOMUNITAS DALAM MENDORONG TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Perkembangan arah transisi energi di Indonesia dari energi fosil ke energi terbarukan masih memiliki berbagai masalah dan tantangan yang menjadi penghambat untuk terwujudnya transisi energi berkeadilan.

Terutama tantangan dalam memastikan prinsip-prinsip keadilan iklim di dalam mengembangkan transisi energi.

Keterlibatan komunitas, khususnya perempuan, masih sangat minim

dalam agenda transisi energi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan

hingga pengawasan dalam pengembangan transisi energi.



A. Tantangan Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan

Secara umum, Indonesia masih menghadapi tantangan yang dapat menghambat terwujudnya transisi energi berkeadilan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tantangan pada kebijakan di Indonesia



Di tingkat kebijakan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu;

- a. Masih memberikan peluang dan bergantung pada penggunaan energi fosil. Meskipun, cadangan energi fosil di Indonesia terus menipis dan diprediksikan hanya bertahan 9-10 tahun kedepan,
- b. Ketidakjelasan dalam rencana penurunan penggunaan energi fosil, termasuk penghentian PLTU Batubara,
- c. Kebijakan dan implementasi transisi energi berkeadilan belum menerapkan prinsip-prinsip keadilan,
- d. Kebijakan energi belum mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan hak asasi perempuan
- e. Kebijakan transisi energi di Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan transisi energi masih bersifat kebijakan operasional yang berbentuk Peraturan Presiden, sementara belum ada Undang-Undang yang dapat menjadi

ijakan dan landasan pemerintah Indonesia dalam menjalankan transisi energi berkeadilan,

f

Kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sepenuhnya mendorong transisi energi berkeadilan,

g

Belum terbangunnya sistem Tata Kelola yang baik dalam menjalankan transisi energi berkeadilan. Tata Kelola adalah sebuah proses dan cara yang tersistem dari mulai merencanakan, mengelola dan menjalankan transisi energi berkeadilan. Tata Kelola yang baik mencakup pada aspek kebijakan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan dan keadilan, penegakan hukum, dan pengawasan,

h

Pelaksanaan proyek transisi energi masih bersifat *top-down* dan *sentralistik*,



Top down yang berarti pelaksanaan yang dirancang dan dilaksanakan dari pusat atau atas ke bawah.

Sementara, **sentralistik** maksudnya adalah pelaksanaan transisi energi ini harus berpusat di tingkat nasional/pusat.

Contohnya:

Proyek energi yang masuk pada daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan transisi energi berbasis sumber daya lokal dan berbasis komunitas,

i

Belum ada kebijakan yang melindungi dan mendukung inisiatif komunitas dalam mengembangkan energi terbarukan skala kecil, termasuk soal pendanaannya,

j

Pendanaan transisi energi masih berpusat pada proyek-proyek transisi energi skala besar yang dikelola oleh Perusahaan. Sehingga, kebutuhan pendanaan yang besar berpotensi untuk menggunakan pendanaan utang, yang malah menambah beban masyarakat Indonesia,

k

Implementasi proyek transisi energi masih mengutamakan pada teknologi dan skala besar, sehingga menghambat bahkan meniadakan ruang bagi komunitas, terutama perempuan, untuk berpartisipasi dalam pengembangan transisi energi yang adil bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Proyek-proyek transisi energi skala besar berdampak pada kerusakan lingkungan, deforestasi, perampasan lahan-lahan rakyat yang diambil, alih fungsi lahan produktif, menghilangkan sumber mata pencaharian perempuan, hingga kekerasan,

Selengkapnya, dapat dibaca di Buku Saku I
“Perempuan Menyuarakan Transisi Energi Berkeadilan”

i

Pendanaan transisi energi masih berpusat pada proyek-proyek transisi energi skala besar yang dikelola oleh Perusahaan. Sehingga, kebutuhan pendanaan yang besar berpotensi untuk menggunakan pendanaan utang, yang malah menambah beban masyarakat Indonesia,

m

Belum tersedianya mekanisme perlindungan (*safeguard*) lingkungan dan hak perempuan dalam menjalankan transisi energi, termasuk mekanisme pengaduan yang responsif gender.



2. Tantangan juga masih dialami komunitas,

Tantangan dialami oleh komunitas, terutama perempuan. Dalam upaya mendorong transisi energi berkeadilan, perempuan masih menghadapi tantangan untuk dapat berpartisipasi, yaitu:



- a Sistem sosial yang masih melihat urusan energi hanya milik laki-laki. Sementara perempuan masih ditempatkan pada kerja-kerja domestik. Cara pandang ini menghambat bagi perempuan komunitas untuk terlibat di dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.
- b Keterbatasan informasi dan pengetahuan perempuan mengenai transisi energi berkeadilan.
- c Kurangnya peningkatan kapasitas bagi perempuan untuk mengembangkan transisi energi berbasis komunitas dan pengetahuan perempuan.
- d Kurangnya kapasitas perempuan komunitas dalam menggunakan atau mengakses penggunaan teknologi dalam mendorong transisi energi berkeadilan.

e

Kurangnya pendanaan dan infrastruktur yang dapat diakses oleh perempuan dalam mengembangkan transisi energi berkeadilan berbasis komunitas.

Tantangan yang terjadi baik di tingkat kebijakan maupun pada sosio-kultur telah menghambat akses komunitas, terutama perempuan untuk dapat mengembangkan dan menikmati energi yang bersih, aman dan murah/terjangkau.

B. Peluang Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan

Meskipun berbagai tantangan masih ditemukan, namun juga ditemukan berbagai peluang untuk berpartisipasi bermakna dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan.

- a Isu transisi energi menjadi perhatian global termasuk di Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim.
- b Sumber daya alam di komunitas yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi terbarukan sangat besar seperti air, sinar matahari, dan lainnya.
- c Banyaknya inisiatif-inisiatif komunitas, termasuk perempuan, dalam pengembangan energi terbarukan, seperti solar panel berbasis komunitas.

Pengembangan energi terbarukan yang digerakkan perempuan pemimpin di komunitas dapat menjadi praktik baik yang disebarluaskan kepada komunitas lainnya.

- d** Pendanaan transisi energi. Saat ini, pendanaan pengembangan transisi energi cukup besar, baik yang berasal dari pendanaan internasional maupun pendanaan pemerintah nasional. Namun, masih sangat sedikit yang dialokasi untuk masyarakat, khusus perempuan dalam pengembangan energi terbarukan.
- e** Kolaborasi antar pemangku kepentingan, terutama di tingkat daerah, akan menjadi peluang bagi perempuan komunitas mengembangkan transisi energi berkeadilan.
- f** Kebijakan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak perempuan dalam pembangunan. Kebijakan ini menjadi peluang untuk digunakan dalam memastikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, termasuk dalam agenda transisi energi yang berkeadilan.



BAB II

APA YANG BISA DILAKUKAN PEREMPUAN KOMUNITAS DAN MASYARAKAT UMUM

Melihat berbagai tantangan dan peluang yang ada, maka perempuan komunitas dan masyarakat umum dapat melakukan berbagai hal untuk berpartisipasi mendorong proses transisi energi yang adil, termasuk menentukan pilihan bentuk transisi energi yang berkeadilan bagi komunitas, terutama perempuan dan masyarakat miskin lainnya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan dan masyarakat umum untuk mendorong transisi energi berkeadilan, yaitu:

A. Bagi Perempuan Komunitas

- a. Memperkuat kapasitas perempuan komunitas.** Hal ini menjadi hal penting untuk dilakukan perempuan komunitas dalam mengembangkan transisi energi berkeadilan.



Perempuan penting memahami dan mendapatkan pengetahuan tentang transisi energi berkeadilan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan.

- b. Memperluas informasi dan pengetahuan perempuan komunitas** kepada perempuan dan masyarakat lainnya tentang transisi energi berkeadilan.
- c. Mengidentifikasi dan memulai mengembangkan inisiatif perempuan komunitas** dalam mendorong transisi energi berkeadilan. Seperti mengembangkan solar panel di rumah tangga, pembangunan mikro hidro, dan lainnya
- d. Bersama masyarakat dan pihak-pihak lainnya, melakukan perubahan perilaku yang hemat energi.** Upaya ini dapat berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca.
- e. Mendorong pemerintah nasional dan daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung dan memfasilitasi perempuan komunitas,** termasuk alokasi pendanaan, dalam mengembangkan transisi energi berkeadilan yang berbasis pengalaman dan pengetahuan perempuan melalui kebijakan dan program-program transisi energi berkeadilan. Upaya ini dapat dilakukan melalui musrenbangdes/pembangunan desa, dialog dengan pemerintah lokal dan nasional, dan lain sebagainya.

- f. Menyebarluaskan situasi dan gagasan perempuan komunitas** dalam mengembangkan transisi energi yang berkeadilan kepada masyarakat dan publik luas lainnya.
- g. Melakukan pemeriksaan, pemantauan atau pengawasan terhadap proyek-proyek transisi energi** yang dikembangkan pemerintah dan sektor swasta, untuk memastikan prinsip-prinsip keadilan dan GEDSI diintegrasikan.
- h. Melakukan pelaporan atau pengaduan kepada pengambil kebijakan** terkait di tingkat daerah, nasional hingga Internasional terhadap proyek transisi energi yang tidak berkeadilan

B. Bagi Masyarakat Umum

- a. Mengakui pengetahuan dan pengalaman perempuan** dalam pengembangan energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan.
- b. Mendukung inisiatif dan upaya perempuan dalam mengembangkan transisi energi berkeadilan.**
Dukungan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti berbagi peran kerja domestik, terlibat mengembangkan



energi terbarukan yang diinisiasi perempuan, dan lain sebagainya.

- c. Menyuarakan inisiatif dan upaya yang dilakukan perempuan komunitas** kepada publik lainnya.
- d. Turut mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kebijakan dan proyek transisi energi berkeadilan skala kecil.**
- e. Melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kebijakan dan proyek-proyek transisi energi**, sejauh mana kebijakan dan proyek mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dan GEDSI, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya.
- f. Melakukan pelaporan atau pengaduan kepada pengambil kebijakan** di berbagai level terhadap proyek transisi energi yang tidak berkeadilan.



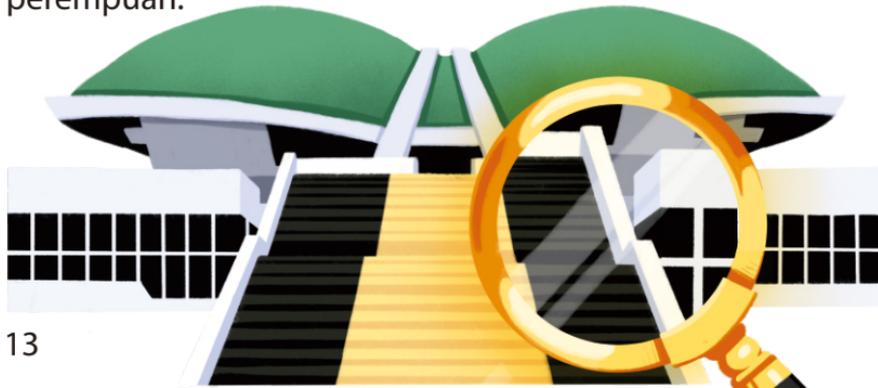
BAB III

BAGAIMANA CARA MENDORONG TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Di atas telah digambarkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh perempuan komunitas dan masyarakat umum dalam mendorong transisi energi berkeadilan.

Terutama dalam mendorong pemerintah dan pihak-pihak yang selama ini telah menyebabkan perubahan iklim dan berdampak pada hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak perempuan.

Negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengakui, melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan partisipasi bermakna bagi perempuan.



Artinya perempuan tidak hanya diundang, tetapi perempuan juga diberikan ruang untuk menyampaikan usulannya pada forum-forum pengambilan keputusan yang aman dan nyaman bagi perempuan, termasuk bebas dari intimidasi.

A. Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah untuk memastikan transisi energi berkeadilan



Pemerintah di tingkat desa, daerah dan nasional perlu melakukan;

- a. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami perempuan komunitas mengenai transisi energi berkeadilan.
- b. Melibatkan perempuan komunitas secara bermakna dalam pengembangan energi terbarukan yang berkeadilan,
- c. Menyediakan alokasi pendanaan/anggaran maupun peningkatan kapasitas bagi perempuan dalam mengembangkan energi terbarukan yang
- d. Membangun kebijakan yang mendukung inisiatif komunitas, termasuk inisiatif perempuan, dalam pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.

B. Nah, bagaimana cara kita untuk mengupayakan terjadinya transisi energi?

1. Bagi Perempuan Komunitas, upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:



Meningkatkan pengetahuan dan membangun kesadaran soal transisi energi.

Untuk itu, dapat dilakukan melalui;

- a. Membuat ruang-ruang diskusi kelompok perempuan untuk membicarakan hak-hak perempuan, energi, perubahan iklim dan transisi energi berkeadilan,
- b. Melakukan berbagai pelatihan berkaitan transisi energi berkeadilan,
- c. Membuka ruang bagi perempuan untuk berbagi cerita dengan perempuan dan masyarakat lainnya, baik dengan kelompok laki-laki, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa.



Meningkatkan keterampilan dan mengembangkan inisiatif perempuan dalam pengembangan energi terbarukan berkeadilan dan berbasis komunitas.

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara;

- a.** Mengidentifikasi sumber daya alam yang dapat diakses, dikelola dan dimanfaatkan perempuan,
- b.** Mengidentifikasi kapasitas dan kekuatan yang dimiliki perempuan dalam mengembangkan transisi energi berkeadilan,
- c.** Membentuk kelompok perempuan dalam mengembangkan praktik transisi energi berkeadilan berbasis komunitas bersama masyarakat lainnya,
- d.** Membangun perencanaan bersama dalam menjalankan praktik transisi energi yang berkeadilan.



Menyuarakan dan mengkampanyekan transisi energi berkeadilan melalui berbagai forum ataupun media yang dapat diakses oleh perempuan.

Perempuan dapat menceritakan situasi, dampak maupun inisiatif perempuan komunitas dalam mengembangkan transisi energi berkeadilan.

Upaya dapat dilakukan dengan cara;

- a. Menyampaikan pengalaman dan inisiatif perempuan pada forum-forum pengambilan keputusan,
- b. Menginformasikan pada ruang-ruang publik, melalui aksi-aksi damai,
- c. Mengkampanyekan melalui media sosial, seperti Facebook, WhatsApp (WA), Instagram, Tiktok dan lainnya.



Melakukan advokasi dalam mendorong kebijakan transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan.

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara;

- a.** Hadir dan terlibat aktif pada forum rapat pengambilan keputusan untuk menyampaikan situasi, pengalaman dan usulan perempuan, termasuk kebutuhan perempuan,
- b.** Terlibat aktif dalam merancang, merencanakan, melaksanakan, hingga memantau pelaksanaan proyek energi terbarukan di tingkat lokal.

2. Bagi Masyarakat Umum

Tidak hanya perempuan komunitas, masyarakat umum juga dapat terlibat mendorong transisi energi berkeadilan.

Bagaimana masyarakat umum dapat terlibat?

- a.** Terlibat aktif bersama kelompok perempuan dalam mengembangkan energi terbarukan berbasis komunitas, mulai merancang, merencanakan hingga pelaksanaannya.

b. Aktif mencari berbagai informasi mengenai transisi energi berkeadilan, termasuk kebijakan dan proyek-proyek transisi energi.

c. Hadir dan terlibat aktif pada forum-forum pengambilan keputusan di tingkat lokal untuk menyampaikan situasi dan usulan masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.

d. Berkampanye dan menyuarakan di berbagai ruang dan media, seperti diskusi-diskusi publik, termasuk menggunakan media sosial untuk menyuarakan transisi energi berkeadilan, seperti menggunakan facebook, instagram, whatsapp, tiktok dan lainnya.

e. Melakukan pemantauan atau pengawasanterhadap kebijakan dan atau proyek transisi energi di komunitasnya untuk memastikan prinsip keadilan dan GEDSI diimplementasikan oleh pemerintah maupun swasta.



Transisi energi yang berkeadilan adalah proses transisi energi yang inklusif, transparan, akuntabel dan tidak meninggalkan pihak manapun karena pada prinsipnya energi berkeadilan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.



GEDSI dalam konsep energi merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan hak semua orang, termasuk perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya terpenuhi, demi terwujudnya transisi energi berkeadilan dan inklusi untuk semua pihak.